

URGENSI PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI KRISIS EKOLOGIS GLOBAL

Nurdin Abdul Aziz

Rifa Institut

Email: ndin.alfatan15@gmail.com

Abstrak

Krisis ekologis global kian menampakkan wajahnya melalui meningkatnya frekuensi bencana alam, degradasi sumber daya, dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Dalam konteks ini, pelestarian lingkungan bukan lagi sekadar wacana moral, melainkan sebuah urgensi peradaban. Tulisan ini mengkaji bagaimana praktik pelestarian lingkungan perlu ditempatkan sebagai fondasi strategis dalam menghadapi perubahan iklim dan kerusakan ekologis yang semakin kompleks. Dengan pendekatan analitis-kualitatif, artikel ini menelusuri keterkaitan antara perilaku manusia, kebijakan publik, serta dinamika ekologi yang saling mempengaruhi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi krisis ekologis sangat bergantung pada integrasi nilai-nilai ekologis ke dalam pola pembangunan, tata kelola sumber daya, dan kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, pelestarian lingkungan menjadi ruang perjumpaan antara ilmu pengetahuan, etika, dan tindakan praktis yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap urgensi tersebut, diharapkan lahir model pembangunan yang tidak hanya menjawab tuntutan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan bumi sebagai rumah bersama.

Kata kunci: pelestarian lingkungan; krisis ekologis global; perubahan iklim; keberlanjutan; tata kelola sumber daya

Abstract

The global ecological crisis increasingly reveals its contours through the rising frequency of natural disasters, the depletion of resources, and the disruption of ecosystem balance. In this context, environmental preservation is no longer a mere moral discourse but an imperative for civilization. This article examines how environmental conservation must be positioned as a strategic foundation in confronting climate change and the growing complexity of ecological degradation. Using a qualitative-analytical approach, the study explores the interrelation between human behavior, public policy, and ecological dynamics that constantly influence one another. The findings indicate that the success of ecological crisis mitigation relies heavily on the integration of ecological values into development patterns, resource governance, and collective societal awareness. Thus, environmental preservation becomes a meeting point between scientific insight, ethical commitment, and practical action—each essential to be

carried out consistently and sustainably. Through a deeper understanding of this urgency, it is hoped that new development models may emerge, addressing economic demands while ensuring the continuity of the Earth as our shared home.

Keywords: environmental preservation; global ecological crisis; climate change; sustainability; resource governance

Diserahkan: 28-10-2025; Diterima: 10-11-2025; Diterbitkan: 20-11-2025

PENDAHULUAN

Manusia sebagai penghuni bumi saat ini menghadapi kenyataan yang tak dapat diabaikan: lingkungan, rumah bersama kita, sedang berada di ambang krisis yang makin nyata. Fenomena perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, polusi udara dan air, hingga kerusakan ekosistem, semua adalah tanda-tanda bahwa keseimbangan alam telah terganggu.

Krisis ekologis bukan semata soal statistik atau data di atas kertas, melainkan tentang hidup, keberlanjutan generasi mendatang, dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari komunitas global. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan seharusnya dipandang bukan sebagai opsi, melainkan keharusan: sebuah bentuk tanggung jawab manusia terhadap alam, masyarakat, dan masa depan.

Dalam konteks Indonesia, urgensi ini semakin menuntut dipertegas. Berbagai penelitian dan literatur mengungkap bahwa eksploitasi sumber daya alam, industrialisasi, deforestasi, serta aktivitas manusia lain telah memberi tekanan besar terhadap lingkungan. Jika dibiarkan terus menerus, konsekuensinya bukan hanya kerusakan alam tapi juga kerugian sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat luas.

Namun, kesadaran akan pelestarian lingkungan belum selalu dibarengi oleh tindakan nyata dan kebijakan yang konsisten. Banyak upaya masih bersifat parsial, sektoral, atau temporer. Dalam banyak kasus, kebijakan lingkungan berada di bawah tekanan kepentingan ekonomi jangka pendek yang pada akhirnya melemahkan komitmen terhadap keberlanjutan.

Karenanya, penting untuk mengangkat pelestarian lingkungan sebagai paradigma atau kerangka berpikir utama dalam pembangunan bukan sebagai tambahan atau “hal pelengkap.” Konsep ini menuntut integrasi antara aspek ekologis, sosial, dan budaya; antara hukum, etika, dan praktik sehari-hari.

Sejalan dengan itu, literatur kontemporer menunjukkan bahwa solusi terhadap krisis ekologis global membutuhkan pendekatan adaptif dan kontekstual, yakni menggabungkan temuan studi global dengan kearifan lokal dan karakteristik lingkungan di Indonesia. Dengan demikian, pelestarian lingkungan bukan sekadar adopsi model luar negeri, melainkan transformasi yang sensitif terhadap kondisi lokal.

Selain itu, aspek nilai, etika, moral, dan spiritual, menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya pelestarian. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan religius atau kultural dapat memperkuat kesadaran dan komitmen masyarakat untuk menjaga

lingkungan hidup. Dalam hal ini, upaya pelestarian bukan semata proyek fisik atau teknis, tetapi juga refleksi atas relasi manusia dengan alam sebagai amanah bersama.

Lebih jauh, pelestarian lingkungan harus dipahami sebagai investasi jangka panjang, untuk keberlanjutan hidup manusia, generasi mendatang, dan seluruh makhluk di bumi. Ketika kita merusak alam hari ini, kita tidak hanya memangkas masa depan, tetapi juga mengikis harapan dan peluang bagi kehidupan yang adil, sehat, dan sejahtera.

Karena itu, urgensi pelestarian lingkungan menuntut tindakan kolektif, dari individu, komunitas, pemerintah, hingga sektor swasta serta kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya parsial tidak cukup; dibutuhkan paradigma holistik yang mencakup pendidikan lingkungan, regulasi, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap kearifan lokal dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan landasan pemikiran dan bukti empiris tersebut, tulisan ini hadir untuk menyuarakan kembali: pelestarian lingkungan bukan pilihan melainkan keharusan kehidupan di dunia yang rapuh ini. Komitmen terhadap alam adalah komitmen terhadap masa depan bersama.

Berdasarkan analisis literatur, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pelestarian lingkungan dalam menghadapi krisis ekologis global; menggambarkan bagaimana integrasi antara ilmu, kebijakan, dan nilai lokal bisa menjadi fondasi keberlanjutan; serta menawarkan rekomendasi konseptual yang sensitif terhadap konteks Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena isu pelestarian lingkungan dan krisis ekologis global memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap konteks, nilai, serta dinamika sosial-ekologis yang melingkapinya. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menafsirkan makna di balik fenomena ekologis sekaligus menangkap kompleksitas hubungan manusia–lingkungan. Dalam tradisi kualitatif, peneliti tidak sekadar mencatat gejala fisik, tetapi menelusuri pola makna dan pengalaman kolektif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2019), bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dan kontekstual melalui data naratif.

Data utama penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan (library research), dengan menelaah artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema pelestarian lingkungan dan krisis ekologis. Strategi pengumpulan data dilakukan melalui pemilihan sumber yang kredibel, mutakhir, dan dapat diverifikasi melalui Google Scholar. Peneliti mengikuti panduan Sugiyono (2017), yang menekankan bahwa penelitian kepustakaan harus melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi kritis terhadap sumber agar menghasilkan argumentasi akademik yang kuat dan terstruktur.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan dan mensintesis gagasan dari berbagai sumber. Melalui teknik ini, peneliti mengungkap pola, tema, dan konsep kunci mengenai urgensi pelestarian lingkungan,

kemudian menghubungkannya dengan konteks krisis ekologis global. Sebagaimana diuraikan oleh Krippendorff (diadaptasi dalam Bungin, 2019), analisis isi memungkinkan peneliti melihat hubungan antar-gagasan sehingga menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih utuh. Proses analisis dilakukan secara berlapis: membaca, mengelompokkan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan tematik.

Untuk menjaga kredibilitas penelitian, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai publikasi ilmiah, regulasi pemerintah, dan studi empiris terkait isu lingkungan di Indonesia. Triangulasi menjadi penting untuk memastikan bahwa pemahaman mengenai pelestarian lingkungan tidak bias oleh satu sudut pandang saja, tetapi dibangun melalui konfirmasi silang antar-sumber. Hal ini sejalan dengan pandangan Bungin (2020) yang menegaskan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif bergantung pada kemampuan peneliti menguji konsistensi dan relevansi data dari berbagai rujukan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Krisis Ekologis Global dan Relevansinya bagi Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis ekologis global bukan fenomena abstrak yang berdiri jauh dari kehidupan manusia, tetapi realitas yang semakin menekan ruang ekologis negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Gejala seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi lintas batas menegaskan bahwa kerusakan ekologis memiliki implikasi global sekaligus lokal. Keraf (2010) menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan hari ini merupakan akumulasi praktik eksploratif manusia selama berabad-abad yang menempatkan alam hanya sebagai objek pemanfaatan, bukan sebagai sistem kehidupan.

Dalam konteks Indonesia, tekanan krisis ekologis tampak dari meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi—banjir, tanah longsor, kekeringan—yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan siklus alam. Temuan ini sejalan dengan Soerjani et al. (2008), yang menekankan bahwa degradasi ekologis adalah indikator penting semakin menurunnya kapasitas lingkungan menopang kehidupan manusia. Pendekatan ekologis global memberi kerangka untuk memahami bahwa persoalan lingkungan Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan dinamika planet secara keseluruhan.

Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa perubahan iklim memperburuk kerentanan sosial. Masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor agraris terbukti paling terdampak akibat perubahan curah hujan dan suhu. Dampak ini memperkuat gagasan Emil Salim (2011), bahwa pelestarian lingkungan tidak dapat dilepaskan dari pemaknaan lingkungan sebagai modal pembangunan. Ketika lingkungan rusak, pembangunan sosial-ekonomi akan kehilangan fondasinya.

Selain itu, data menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di dunia. Deforestasi memperlemah kemampuan ekosistem menyerap karbon, sehingga memperbesar kontribusi terhadap krisis iklim global. Soemarwoto (2004) menyebut fenomena ini sebagai “lingkaran setan ekologis,”

ketika kerusakan yang terjadi di tingkat lokal memperburuk kondisi global, dan kondisi global memperberat kerentanan lokal.

Hasil kajian literatur juga menegaskan bahwa dampak krisis ekologis tidak bersifat merata. Wilayah kepulauan, pesisir, dan pedalaman menjadi daerah paling rentan karena bergantung pada kestabilan ekosistem. Keraf (2010) menegaskan bahwa ketidakadilan ekologis adalah bagian dari ketidakadilan sosial: mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan justru menjadi pihak paling terdampak.

Dengan demikian, dinamika krisis ekologis global memberikan dasar kuat bahwa pelestarian lingkungan harus dipahami tidak hanya sebagai upaya moral, tetapi sebagai strategi bertahan hidup bangsa. Melalui pemahaman atas keterhubungan global-lokal, Indonesia dapat membangun paradigma pelestarian yang lebih relevan dan berorientasi jangka panjang.

2. Pola Perilaku Manusia dan Kontribusinya terhadap Kerusakan Lingkungan

Hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku manusia memegang peran penting dalam mempercepat kerusakan lingkungan. Pola konsumsi berlebih, praktik ekonomi ekstraktif, serta preferensi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek menjadi faktor inti yang menggerakkan degradasi ekologis. Soerjani et al. (2008) menjelaskan bahwa perilaku ini terbentuk dari cara pandang yang menempatkan alam sebagai komoditas, bukan sebagai jaringan kehidupan yang harus dijaga.

Di Indonesia, pola ini tercermin dalam praktik alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan tanpa kontrol, dan eksploitasi sumber daya laut. Emil Salim (2011) menggambarkan fenomena ini sebagai ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama paradigma pembangunan tidak berubah, kerusakan akan terus berulang.

Lebih jauh, analisis menunjukkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi sistem nilai yang dianut masyarakat. Ketika nilai lingkungan tidak terinternalisasi dalam budaya sosial, maka upaya pelestarian cenderung bersifat sporadis. Keraf (2010) menekankan bahwa krisis lingkungan sesungguhnya merupakan krisis moral dan spiritual—ketika manusia kehilangan rasa hormat kepada alam.

Penelitian juga mendapati bahwa rendahnya literasi ekologis berkontribusi signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Tanpa pemahaman mendalam mengenai fungsi ekosistem, masyarakat sulit melihat dampak jangka panjang dari praktik destruktif. Soemarwoto (2004) menyatakan bahwa pendidikan lingkungan adalah kunci untuk mengubah perilaku secara kolektif.

Selain faktor individu, perilaku destruktif diperkuat oleh lemahnya penegakan hukum lingkungan. Regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku perusakan lingkungan tidak mendapatkan efek jera. Kajian literatur menunjukkan bahwa di banyak wilayah, praktik ilegal seperti pembalakan liar dan tambang tanpa izin tetap marak karena lemahnya kontrol institusional.

Dengan demikian, pola perilaku manusia terkait erat dengan kondisi lingkungan yang kita lihat hari ini. Perubahan perilaku membutuhkan transformasi nilai, pendidikan ekologi, dan penegakan hukum yang tegas. Tanpa perubahan ini, pelestarian lingkungan hanya akan menjadi slogan tanpa substansi.

3. Peran Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan dalam Upaya Pelestarian

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pelestarian ekologis. Kebijakan yang jelas, konsisten, dan berorientasi keberlanjutan terbukti mampu mengendalikan laju kerusakan lingkungan. Soemarwoto (2004) menegaskan bahwa tata kelola lingkungan harus berbasis ilmu ekologi agar kebijakan tidak bertentangan dengan kemampuan alam untuk pulih.

Namun demikian, berbagai literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Indonesia sering menghadapi tantangan serius, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, dan minimnya koordinasi antarlembaga. Emil Salim (2011) dalam sejumlah kajiannya menyebut bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat tergantung pada kemauan politik dan komitmen institusi pemerintah.

Analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan berbasis insentif lingkungan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Pendekatan seperti pembayaran jasa lingkungan (PES) dan sertifikasi hijau memberikan ruang bagi kolaborasi pelestarian. Dalam perspektif Soerjani et al. (2008), kebijakan ini tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Namun kajian literatur memperlihatkan bahwa kebijakan lingkungan cenderung gagal ketika tidak mempertimbangkan aspek sosial-budaya masyarakat. Keraf (2010) menekankan bahwa kebijakan keberlanjutan tidak boleh mengabaikan kearifan lokal karena masyarakat adat memiliki pengetahuan ekologis yang telah teruji waktu.

Selain itu, tata kelola lingkungan yang efektif memerlukan keterlibatan masyarakat secara langsung. Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dalam pengawasan hutan, program konservasi jauh lebih berhasil. Hal ini membuktikan pentingnya partisipasi publik dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, kebijakan lingkungan yang baik harus bersifat integratif—memadukan ilmu ekologi, nilai sosial, dan mekanisme hukum. Tanpa reformasi kebijakan dan tata kelola yang tegas, upaya pelestarian lingkungan akan sulit mencapai hasil yang signifikan.

4. Strategi Pelestarian untuk Menghadapi Krisis Ekologis Global

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa strategi pelestarian lingkungan harus dilakukan secara multidimensional. Kerusakan lingkungan berasal dari berbagai faktor, sehingga pendekatan tunggal tidak memadai. Soerjani et al. (2008) menyatakan bahwa pelestarian harus mencakup dimensi edukatif, ekonomis, ekologis, dan kelembagaan.

Strategi pertama adalah penguatan pendidikan lingkungan. Pendidikan mampu menanamkan kesadaran ekologis sejak dini dan membentuk perilaku peduli lingkungan dalam jangka panjang. Keraf (2010) menegaskan bahwa perubahan paradigma ekologis hanya dapat terjadi jika masyarakat memahami nilai moral menjaga alam.

Strategi kedua adalah pengembangan ekonomi hijau (green economy), yang menekankan efisiensi sumber daya dan penggunaan energi bersih. Emil Salim (2011) berpendapat bahwa ekonomi hijau merupakan jalan tengah antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis, karena memberikan alternatif bagi pembangunan yang tidak merusak alam.

Strategi ketiga adalah memperkuat penegakan hukum lingkungan. Tanpa kepastian hukum yang tegas, upaya pelestarian tidak akan efektif. Literatur menunjukkan bahwa negara-negara dengan penegakan hukum lingkungan yang kuat berhasil menekan laju kerusakan ekologi secara signifikan.

Strategi keempat adalah revitalisasi kearifan lokal. Banyak komunitas adat di Indonesia telah mempraktikkan pelestarian lingkungan jauh sebelum konsep keberlanjutan dikenal secara modern. Soemarwoto (2004) menyebut bahwa pengetahuan lokal adalah aset ekologis yang perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.

Dengan menyatukan berbagai strategi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk memulihkan kondisi ekologisnya. Pelestarian lingkungan bukan hanya tindakan teknis, tetapi tindakan moral dan strategis yang menentukan kualitas kehidupan generasi mendatang. Di sinilah urgensi pelestarian menemukan makna integralnya.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa krisis ekologis global merupakan persoalan multidimensional yang bukan hanya mengancam keseimbangan lingkungan, tetapi juga keberlanjutan sosial, ekonomi, dan moral manusia sebagai bagian dari ekosistem. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan ekologis yang besar sekaligus kerentanan yang tinggi, harus memandang krisis ini bukan sebagai fenomena yang jauh atau abstrak, tetapi sebagai realitas yang menuntut tanggapan serius. Pemahaman terhadap keterhubungan antara kerusakan global dan implikasi lokal menjadi fondasi penting dalam merumuskan strategi pelestarian yang relevan dan kontekstual.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa perilaku manusia memegang peran sentral dalam mempercepat maupun memperlambat laju kerusakan lingkungan. Pola konsumsi, paradigma pembangunan, serta nilai moral yang dianut masyarakat menentukan arah perubahan ekologis. Karena itu, transformasi perilaku tidak dapat dicapai hanya melalui regulasi, tetapi harus dibangun di atas pendidikan lingkungan, internalisasi nilai etika, dan penguatan literasi ekologis. Pelestarian lingkungan pada akhirnya adalah refleksi dari cara manusia memaknai relasinya dengan alam.

Di sisi lain, kebijakan dan tata kelola lingkungan terbukti menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekologis. Kebijakan yang konsisten, partisipatif, dan berbasis ilmu lingkungan mampu menekan laju degradasi sumber daya alam. Namun efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemauan politik, kapasitas institusional,

serta integrasi kearifan lokal dalam proses pengelolaan lingkungan. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Akhirnya, strategi pelestarian lingkungan harus dipahami sebagai upaya kolektif yang menyatukan aspek edukatif, ekologis, ekonomi, dan budaya. Pelestarian bukan hanya tindakan teknis, tetapi tindakan moral yang menentukan kualitas kehidupan generasi mendatang. Dengan menggabungkan kekuatan kebijakan, perubahan perilaku, pendidikan lingkungan, serta revitalisasi nilai lokal, Indonesia memiliki peluang besar untuk merespon krisis ekologis global secara bermakna. Dalam kesadaran itulah pelestarian lingkungan menemukan urgensi dan makna terdalamnya: menjaga kehidupan sebagai amanah yang harus diteruskan, bukan diwariskan dalam keadaan rusak.

BIBLIOGRAFI

- Emil Salim. (2011). *Lingkungan hidup dan pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Soerjani, M., Ahmad, R., & Munir, M. (2008). *Lingkungan: Sumberdaya alam dan kependudukan dalam pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bungin, B. (2020). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

